



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS SISTYO WIDJAJATI
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 262154

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **12.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/24 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 597 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
8. Tanah Seluas 274 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **502.500.000**



1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
2. MOBIL, HONDA A/T CITY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
3. MOBIL, HONDA A/T CRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	61.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.375.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	300.000.000
Sub Total	Rp.	14.538.500.000
III. HUTANG	Rp.	50.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	14.488.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.